

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan satu diantara yang lainnya yang menjadi tujuan negara berkembang. Pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan tetapi peningkatan kesejahteraan penduduknya, keamanan serta kualitas dari sumber daya, yakni sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu pelaksana dalam membangun ekonomi yaitu sumber daya manusia (SDM), karena kuantitas penduduk merupakan unsur utama dalam pembangunan suatu negara.

Pembangunan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan dari pembangunan itu sendiri, hal ini tertuang didalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yakni “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Bank Dunia tahun 1991 dalam publikasi resminya, yakni *World Development Report*, menegaskan “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan, bukan hanya tentang pendapatan tetapi kesehatan, pendidikan, peningkatan kebebasan individual dan sebagainya.”<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam konsep pembangunan ekonomi sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, hal ini berbeda dengan konsep ekonomi barat, terutama

---

<sup>1</sup> Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, ed. by S.E Devri Barnadi, Suryadi Saat, and M.M Wibi Hardani, kesembilan (Jakarta: Erlangga, 2006).

mengenai esensinya. Pembangunan ekonomi berdasarkan Islam tujuan akhirnya kesejahteraan yang komprehensif dan menyeluruh di dunia maupun di akhirat.

*Human Development Index* yang lebih populer dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu parameter yang digunakan dalam mengukur aspek yang ada kaitannya dengan hasil pembangunan ekonomi yakni pembangunan manusia. *Human Development Index* (HDI) dibagi menjadi tiga dimensi, yakni dimensi kesehatan diukur melalui indikator usia harapan hidup, pendidikan diukur dengan menggabungkan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, daya beli diukur berdasarkan rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

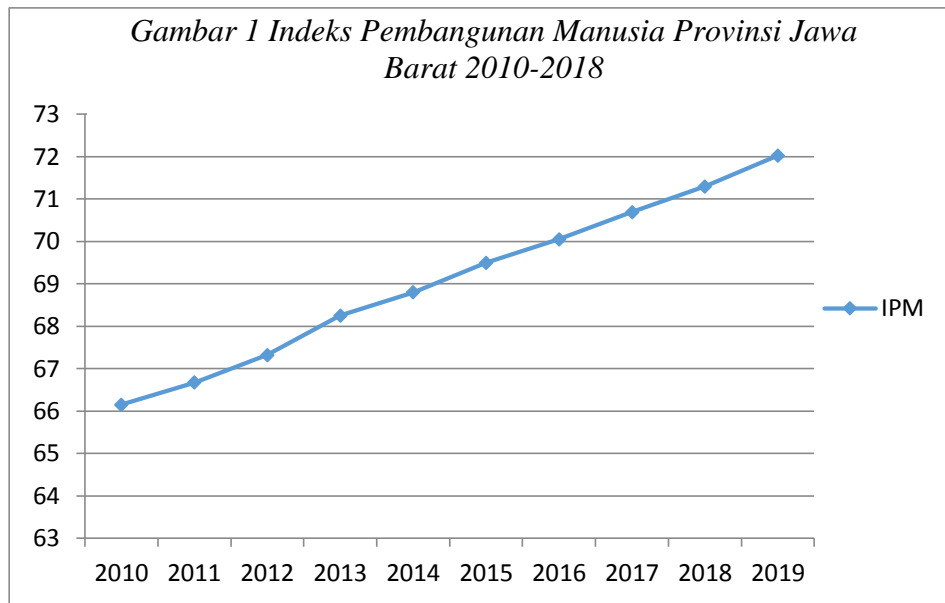
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menjadi harapan besar agar kualitas pembangunan manusia lebih baik. Seperti yang tertera dalam tabel berikut:

*Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia*

<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>										
Jawa Barat	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, data diolah

Tabel diatas merupakan indeks pembangunan manusia di Jawa Barat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, dimana setiap tahunnya IPM Jawa Barat mengalami kenaikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, data diolah

Menurut BPS, peningkatan IPM ditopang oleh meningkatnya komponen IPM, yakni bayi baru lahir memiliki peluang hidup hingga 72,66 tahun, lebih lama 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Pengukuran HDI yang dianggap telah memenuhi didalam mengukur sebuah kesejahteraan suatu penduduk nyatanya masih memiliki kritikan. Kritikan tersebut mengenai adanya pemikiran bahwa semua penduduk diperlakukan sama oleh pemerintah dan kurang terhadap terhadap pemikiran yang berkaitan dengan teknologi merupakan kritikan terhadap HDI.<sup>3</sup>

*Human Development Index* (HDI) dicanangkan tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) merupakan indikator dalam mendeskripsikan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan

<sup>2</sup> REP-JO, 'IPM Jawa Barat Terus Meningkat', <https://jabarprov.go.id/index.php/news/32685/2019/04/15/IPM-Jawa-Barat-Terus-Meningkat>, 2019.

<sup>3</sup> Indeks Pembangunan Manusia, 2015, hlm. 11

representatif namun untuk mengukur pembangunan dalam perspektif Islam tidaklah sepenuhnya kompatibel dikarenakan konsepnya tidak berdasar pada *maqashid syariah*. Sehingga dalam mengukur IPM di daerah yang penduduknya bermayoritas agama Islam maka lebih tepat memakai *Islamic Human Development Index (I-HDI)* dimana konsep dan teorinya menurut *maqashid syariah* yaitu terpenuhinya keadilan distribusi melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia agar dapat menjaga kemaslahatan kehidupan manusia (agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta). Hal ini selaras dengan riset K.A Ishaq (2003) yang menyatakan kalau diantara pemicu kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang yaitu diabaikannya instrument pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal. Karena itu, pendekatan konsep ekonomi pembangunan syariah mempunyai posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan, khususnya bagi Indonesia maupun negara-negara anggota OKI.<sup>4</sup> Wan Norhaniza Wan Hasan (2013) (2013) mengkritik kalau ketiga dimensi pembangunan masih sebatas mengukur aspek permukaan manusia. Padahal, manusia tidak hanya sekadar aspek material-fisikal, namun meliputi aspek rohani. Sedangkan, aspek rohani dilewatkan dalam pengukuran pembangunan.<sup>5</sup> Menurut Ausag Ahmad, Konsep HDI oleh UNDP telah meningkatkan popularitas sebagai pengukuran yang komprehensif sejak diperkenalkan secara global melalui laporan pembangunan manusia pertama kali tahun 1990. Pembangunan manusia adalah fokus tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Konsentrasi ekonomi pembangunan adalah

---

<sup>4</sup> Dr. Irfan Syauqi Beik and M. Sc. Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

<sup>5</sup> Farouk Abdullah Alwyni and syahrul Efendi Dasopang, 'Ukuran Pembangunan Islam', *Republika.co.id*, 2015.

melihat bagaimana sumberdaya ekonomi tersebut didistribusikan dan bagaimana suatu kesejahteraan rakyat didefinisikan. Sedangkan dalam ekonomi pembangunan Islam, para pakar muslim memandang ekonomi pembangunan tidak terbatas hanya pada variabel-variabel ekonomi saja.<sup>6</sup>

I-HDI bertujuan untuk mengukur capaian tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk mencapai *falah*. Pengukuran ini dibangun dari konsep *maqashid syariah* pandangan Imam Asy-Syatibi, bahwa dalam kebutuhan dasar manusia dibagi kedalam lima bagian, yaitu dimensi agama (*ad-dien*), dimensi jiwa (*an-nafs*), dimensi intelektual/akal (*al-aql*), dimensi keturunan/keluarga (*an-nasl*) dan dimensi harta (*al-maal*). Apabila dari kelima dimensi ini ada yang tidak terpenuhi atau terjadi ketidakseimbangan maka tidak akan mencapai *falah* atau kebahagiaan tidaklah sempurna.<sup>7</sup> Menurut Ahmad Ausaf, dalam Tiara Rochmawati, (2018) terdapat empat dasar filosofis pendekatan pembangunan dalam Islam, yaitu *tauhid*, *khilafah*, *tazkiyah*. Berdasarkan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi akan memiliki karakter yang luas meliputi aspek moral, spiritual dan material didalamnya.<sup>8</sup>

Menurut MB Hendrie Anto, (2009) *Introduce an Islamic Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*, menghitung I-HDI mendasar pada data yang mencerminkan lima dimensi *maqashid syariah* pertama indikator

---

<sup>6</sup> Rizky Rahmatullah, 'Islamic Human Development Index Di Kawasan Eksplorasi Tambang Batu Bara Di Batu Sopang Kalimantan Timur' (Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>7</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, Empat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>8</sup> Tiara Rochmawati, '*Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) Di Yogyakarta Tahun 2015-2016 Dalam Perspektif Maqasid Syariah*' (Universitas Islam Indonesia, 2018).

yang digunakan pada dimensi *ad-dien* yaitu rasio zakat. Kedua indikator yang digunakan pada dimensi *an-nafs* yakni angka harapan hidup, ketiga dalam dimensi *al-aql* data yang digunakan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, keempat pada dimensi *an-nasl* indikator yang digunakan yaitu data kelahiran total dan data kematian bayi, kelima pada dimensi *al-maal* menggabungkan dua indikator yaitu indikator kepemilikan harta oleh individu dan indikator distribusi pendapatan. Pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan mewakili indikator kepemilikan harta oleh individu, sedangkan indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan mewakili indikator distribusi pendapatan. Pada tahun 2009 berdasarkan penelitian MB. Hendrie Anto, I-HDI Indonesia mencapai 0.582953. Sedangkan Jawa Barat berdasarkan penelitian Ali Rama dan Yusuf Burhanudin tahun 2019, *index* I-HDI nya mencapai 43.<sup>9</sup>

Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk mayoritas muslim. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2019, banyaknya penduduk Jawa Barat yang memeluk agama Islam ± 41 juta jiwa, seperti data yang ditunjukkan pada tabel berikut:

*Tabel 2*  
*Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Agama*  
*Yang Dianut Tahun 2019*

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	41.314.121
2	Kristen	2.714.335

---

<sup>9</sup> Ali Rama and Burhanuddin Yusuf, 'Construction of Islamic Human Development Index', *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 32, No. 1, 2019, 32.1 (2019), 43–64 <<https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.3>>.

3	Katolik	312.715
4	Hindu	42.639
5	Budha	210.453
7	Lainnya	5.657

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat

Data penduduk di Jawa Barat berdasarkan publikasi Provinsi Dalam Angka tahun 2020 menurut agama yang dianut, sebagian besar beragama Islam yaitu 41.314.121 jiwa, kemudian disusul dengan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya.

Hasil penelitian banyak menunjukkan bahwasannya perhitungan dengan menggunakan IPM mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel untuk mengukur kesejahteraan penduduk di negara mayoritas penduduk muslim, karena tidak ada kesesuaian dengan maqashid syariah.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik melakukan suatu kajian dan analisa yang lebih mendalam dan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis *Islamic Human Development Index (I-HDI)* Perspektif *Maqashid Syariah* Terhadap IPM di Jawa Barat Tahun 2015-2019.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana IPM di Jawa Barat dihitung menggunakan I-HDI perspektif *maqashid syariah* tahun 2015-2019?

2. Bagaimana perbandingan hasil capaian pembangunan manusia berdasarkan HDI dan I-HDI perspektif *maqashid syariah* di Jawa Barat tahun 2015-2019?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat yang dihitung berdasarkan perhitungan I-HDI perspektif *maqashid syariah* tahun 2015-2019.
2. Untuk menganalisa perbandingan hasil pembangunan manusia yang diukur berdasarkan HDI dengan yang diukur menggunakan I-HDI persepektif *maqashid syariah* di Jawa Barat pada tahun 2015-2019.

### D. Manfaat Penelitian

#### a. Secara akademis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah mengenai pembangunan manusia secara Islami (I-HDI) yang dilihat dari perspektif *maqashid syariah* yang dipelopori oleh Asy-Syatibi.

#### b. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam menentukan, mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan dalam meningkatkan pembangunan manusia yang sesuai konsep *maqashid syariah* meskipun sistem pemerintahan tidak menggunakan model pemerintahan Islam.